

Kasus Ahmadiyah Ditangani Polisi

MEDIA INDONESIA, 23 MEI 2018

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan penyelesaian kasus penyerangan warga Ahmadiyah di Lombok Timur, NTB, merupakan domain polisi.

RUDY POLICARPUS

rudy@mediaindonesia.com

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak ingin ikut campur dalam penyelesaian kasus penyerangan terhadap penganut Ahmadiyah di Lombok Timur, NTB. Lukman mengatakan kasus itu masuk domain aparat penegak hukum. "Itu ditangani aparat penegak hukum kita," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Lukman menegaskan Kemenag tidak bisa terlalu ikut campur dalam kasus tersebut. Pasalnya kasus itu merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota masyarakat, "Kemenag tentu memonitor, memantau keberadaan umat Ahmadiyah. Tapi itu kan pelanggaran hukum, tindak pidana, sehingga menjadi domain aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian," jelas politikus PPP itu.

Jemaat Ahmadiyah di Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, diserang sekelompok warga pada Sabtu (19/5). Kejadian itu mengakibatkan enam rumah rusak serta empat sepeda motor hancur. "Sekarang ini, 24 jiwa dievakuasi di Polres Lombok Timur," ungkap Yendra Budiana, Sekretaris Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PBJAI) kepada *Medcom.id*.

Kerap berulang

Yendra mengatakan kelompok yang menyerang berasal dari daerah yang sama dengan melakukan perusakan. Menurut dia, amuk massa itu kerap berulang. Pihaknya juga telah melaporkan kepada aparat kepolisian dan beberapa kali dilakukan dialog yang dihadiri Polsek dan Polres Lombok Timur. Penanganan kasus perusakan rumah

warga Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur masih dalam tahap pemeriksaan saksi korban. "Belum ada perkembangan baru, masih pada tahap pemeriksaan saksi korban sekitar 12 orang," kata Kabid Humas Polda NTB Ajun Komisararis Besar (AKB) Komang S kepada wartawan di Mataram, kemarin.

Dikatakan Komang, jika pemeriksaan saksi korban sudah beres, baru masuk ke tahap penyidikan selanjutnya. "Saksi pelaku belum ada karena masih dalam proses," jelas Komang.

Sejauh ini, imbuhnya, penanganan kasus perusakan rumah warga Ahmadiyah tidak diambil alih Polda NTB, tapi ditangani polres setempat. Selain pemeriksaan saksi korban, sedang dilakukan rekonsiliasi dan konsolidasi dari pihak yang berwenang, yakni kepolisian, kodim, dan pemda di Lombok Timur. Mereka mengajak masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat agar menjaga keamanan dan kenyamanan selama Ramadan.

Menurut Komang, warga Ahmadiyah yang mengungsi saat ini masih berada di Polres Lombok Timur. Menurut rencana, mereka akan dipindahkan Balai Latihan Kerja Kabupaten Lombok Timur.

Permasalahan Ahmadiyah di Lombok, imbuhnya, sudah terjadi sejak 1990 lalu. Kemudian pada 2001 pernah dibuatkan kesepakatan bersama, tetapi pada 2017 terjadi lagi intimidasi atau pelemparan rumah penganut Ahmadiyah.

Bahkan, pada Januari lalu telah dilaksanakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah di Lombok Timur, antara lain akan ditempatkan di rumah susun. Namun, sampai saat ini tetap saja ada gejala. Rumah penganut Ahmadiyah dirusak warga sekitar yang tidak menginginkan ada warga Jemaat Ahmadiyah di lingkungan mereka. (YR/P-2)